

FAKTOR DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA***Determinant Factor of The Human Development Index in Indonesia***

Marihot Nasution

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: marihot.nasution@dpr.go.id

Abstract

The human development index (HDI) is one indicator of development progress in aspects of human quality in a country. This study aims to identify the factors that affect the human development index in Indonesia by taking a sample of 34 provinces in Indonesia during the period 2013 to 2017. The analysis technique used is panel data regression using the fixed effect model. The regression results show that the gross regional domestic product (PDRB) per capita and the provincial poverty level have an influence on the high and low human development index. While the variable unemployment rate and fiscal independence ratio do not have a significant effect on HDI. These results imply the importance of regional economic development and poverty alleviation for the sake of increasing the human development index.

Keywords: *Human Development Index, gross regional domestic product per capita, unemployment rate, poverty rate, fiscal independence ratio*

1. Pendahuluan**1.1. Latar Belakang**

Mengapa pembangunan manusia perlu diukur? Pertanyaan ini berawal dari pentingnya memiliki kemampuan untuk mengukur dan memonitor kemajuan dalam pengembangan manusia dengan cermat. Kemampuan mengukur tersebut diperlukan dalam pembuatan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy-making*) yang dapat membantu mengurangi bentuk pengucilan sosial, politik dan ekonomi yang sebaliknya membuat orang tidak menyadari kemampuan mereka (*United Nations Development Programme /UNDP, 2007*).

Pembuatan kebijakan berbasis bukti ini dapat didefinisikan sebagai upaya menggunakan statistik dan sumber informasi lainnya secara sistematis untuk menyoroti masalah, menginformasikan rancangan program dan pilihan kebijakan, memperkirakan masa depan, memantau implementasi kebijakan, dan mengevaluasi dampak kebijakan. Pembuatan kebijakan berbasis bukti adalah

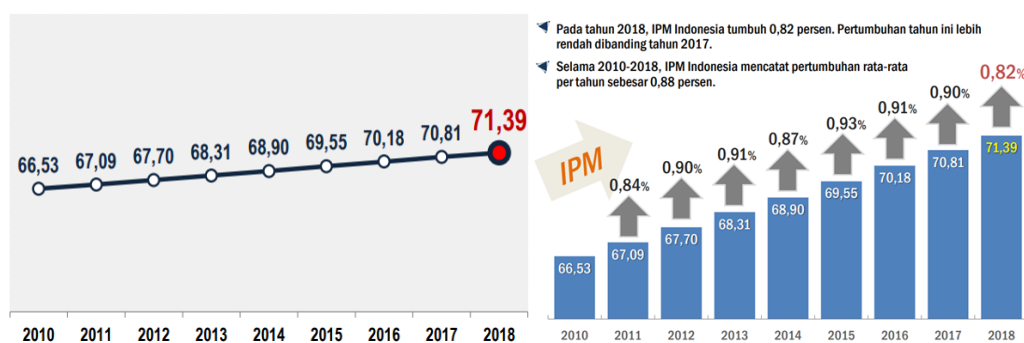
satu-satunya bentuk pembuatan kebijakan yang sepenuhnya konsisten dengan proses politik demokratis yang transparan dan akuntabel (UNDP, 2007).

Atas dasar itu, UNDP memperkenalkan indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 1990 sebagai alat pengukur pembangunan manusia. IPM adalah rata-rata geometris dari indeks normalisasi untuk masing-masing dari tiga dimensi. Tiga dimensi tersebut adalah dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi standar hidup. Dimensi kesehatan dinilai oleh harapan hidup saat lahir. Dimensi pendidikan diukur dengan rata-rata masa sekolah untuk orang dewasa berusia 25 tahun dan lebih, dan, tahun sekolah yang diharapkan untuk anak-anak sekolah memasuki usia tersebut. Dimensi standar hidup diukur dengan pendapatan nasional kotor per kapita (BPS, 2017).

Indikator IPM digunakan dalam banyak proses pembuatan kebijakan di Indonesia. Sebagai contoh, pemerintah pusat menggunakan IPM dalam penentuan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh suatu daerah. Selain itu, IPM merupakan salah satu indikator target pembangunan pemerintah dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI. Komponen IPM (angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita) merupakan indikator yang digunakan dalam penghitungan Dana Insentif Daerah (DID). IPM mampu menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya (BPS, 2019).

Berikut grafik IPM di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2018, sebagai berikut:

Gambar 1. Perkembangan IPM Indonesia



Sumber: BPS, 2019

Dari gambar di atas terlihat bahwa IPM di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 masih tergolong menengah atas dan mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, pada tahun 2018, capaian pembangunan manusia yang

diukur tersebut mencapai angka 71,39 yang membuat pembangunan manusia Indonesia pada tahun 2018 berstatus tinggi (BPS, 2019). Berdasarkan fenomena tersebut IPM menjadi penting untuk dibahas karena kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari seberapa besar pendapatan per kapita yang dimiliki negara tersebut, melainkan seberapa berkualitas sumber daya manusia yang dimiliki negara tersebut untuk proses pembangunan. Sedangkan jika sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara kurang berkualitas maka akan menghambat proses pembangunan. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, faktor-faktor yang terkait dalam IPM harus mendapatkan perhatian. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti apa saja faktor yang mempengaruhi IPM dalam proses pembangunan ekonomi.

Gambar 2. Status IPM di Provinsi di Indonesia



Sumber: BPS, 2019

Jika dilihat seksama, nilai IPM berbeda-beda di tiap provinsi, meskipun kebijakan yang diterapkan merupakan kebijakan yang sama, mandat dari pemerintah pusat. Perbedaan ini muncul karena berbagai sebab seperti lingkungan geografis, kondisi kependudukan, karakter lingkungan, sumber daya alam, kebijakan pemerintah daerah, dan lain sebagainya di tingkat provinsi. Hadirnya kebijakan pemerintah daerah yang berbeda tersebut dapat dipicu oleh munculnya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pada akhir dekade 1990-an Indonesia memulai desentralisasi pembangunan dengan ditandai oleh pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004. Desentralisasi tersebut diarahkan untuk memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan, mendorong kerja sama antar pemerintah daerah, menata

kelembagaan pemerintah daerah agar lebih efektif dan efisien, meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah, meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta menata daerah otonom baru. Akibat dari hadirnya desentralisasi ini, maka pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat menggali potensi daerahnya sendiri dan menjadikannya sumber penerimaan yang disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD bertujuan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya (penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2004). PAD tersebut menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Artinya pemerintah daerah mampu melaksanakan pembangunannya sendiri. Dengan demikian, kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah perlu dikaji pengaruhnya terhadap IPM. Mengingat hasil dari PAD akan dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

Penduduk dapat menjadi objek sekaligus subjek pembangunan, karena itu penduduk merupakan sasaran dari pembangunan dan juga sebagai pelaku dalam pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang signifikan akan berdampak pada perubahan sosial kehidupan masyarakat Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi misalnya dapat menyebabkan munculnya pengangguran jika penduduk berusia produktif tidak dapat diserap oleh lapangan kerja yang ada. Dengan kondisi tersebut, pemerintah tentunya terbangun minatnya untuk lebih banyak menciptakan lapangan kerja melalui pembangunan yang dilaksanakan. Hadirnya penduduk miskin juga memicu pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskannya. Untuk itu perlu juga dikaji dampak kondisi kependudukan tersebut terhadap ukuran pembangunan manusia.

Hasan (2013) dan Eren et al. (2014) menunjukkan bahwa PDB per kapita mempengaruhi tingkat pembangunan. Meningkatnya kinerja indikator pembangunan manusia dapat mempercepat transformasi negara dari negara berkembang menjadi negara maju. Peningkatan PDB per kapita akan meningkatkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Namun, sektor pertumbuhan yang tinggi di

suatu wilayah, tidak serta merta mencerminkan kemakmuran yang adil bagi semua orang di wilayah tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan sendirinya tidak akan diikuti oleh pertumbuhan atau peningkatan distribusi keuntungan untuk seluruh populasi (Todaro dan Smith, 2011). Sebenarnya, peningkatan permintaan akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan perputaran investasi, dan seterusnya. Tetapi bisa juga terjadi konsentrasi kegiatan ekonomi cukup tinggi hanya di daerah tertentu dan tidak di daerah lain. Ini akan memengaruhi ketimpangan pendapatan masyarakat. Hadirnya ketimpangan pendapatan menyebabkan tidak ada dampak produk domestik bruto nyata pada indeks pembangunan manusia (Muhammad, et al, 2010; Hamzah et al. 2012). Berdasarkan kondisi yang dijelaskan sebelumnya, perlu dilihat lagi faktor mana yang memengaruhi IPM di Indonesia. Dengan kondisi unik Indonesia maka hal ini perlu dilakukan demi optimalisasi peningkatan IPM ke depannya.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini berusaha mengetahui apa saja faktor yang memengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia. Beberapa variabel akan digunakan untuk menguji pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia, diantaranya pertumbuhan ekonomi regional yang diukur dengan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan rasio kemandirian fiskal tiap provinsi di Indonesia.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menguji faktor-faktor yang memengaruhi indeks pembangunan manusia di 34 provinsi di Indonesia. Untuk tujuan ini, regresi panel digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel yang dipilih sebagai determinan, diantaranya produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan rasio kemandirian fiskal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan petunjuk tentang bagaimana meningkatkan IPM dalam menjalankan pembangunan Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Landasan Teori

Menurut UNDP (2009), pertumbuhan ekonomi dengan IPM memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. Pembangunan manusia dapat berkelanjutan jika didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Tingginya pertumbuhan ekonomi akan mengubah pola konsumsi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan. Daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi suatu barang berkaitan erat dengan IPM karena daya beli merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yaitu indikator pendapatan (Todaro, 2006). Dengan demikian, cara paling efektif dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan distribusi pendapatan yang adil. Kesimpulan yang sejalan ditemukan oleh Brata (2004) yang menyatakan tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk. Konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumber daya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan tersebut sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya diantaranya Hasan (2013) dan Eren et al. (2014).

Namun, pada perkembangannya UNDP menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung memengaruhi IPM. Hal ini didukung oleh Todaro & Smith (2011) yang menemukan bahwa sektor pertumbuhan tinggi di suatu wilayah tidak secara langsung mencerminkan kemakmuran yang adil bagi semua orang di wilayah tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan sendirinya tidak akan diikuti oleh pertumbuhan atau meningkatkan distribusi keuntungan untuk seluruh populasi. Seperti kondisi sistem kapitalis di daerah maju, bahwa meningkatnya permintaan akan merangsang investasi. Investasi akan meningkatkan pendapatan dan mengarah pada perputaran investasi lagi, dan seterusnya. Ini disebabkan oleh motif profit. Motif profit yang mendorong pembangunan terpusat di daerah yang memiliki ekspektasi laba tinggi, sementara daerah lainnya tetap tergeser. Selain investasi, konsentrasi aktivitas ekonomi yang tinggi di daerah tertentu akan memengaruhi ketimpangan pendapatan masyarakat. Hadirnya ketimpangan pendapatan menyebabkan tidak ada dampak produk domestik bruto nyata pada indeks pembangunan manusia (Muhammad, et al, 2010; Hamzah et al. 2012).

Mengingat pentingnya pemerataan pembangunan suatu wilayah tersebut, maka perlu dikaji pula dampak desentralisasi bagi pembangunan manusia. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah dilakukan tanggal 1 Januari 2001. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Menurut Barzelay (1991) pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu: (a) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, (b) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, dan (c) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Tujuan lain dari pelaksanaan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban yang tidak perlu dan mendorong prakarsa serta kemampuan daerah sehingga daerah menjadi lebih mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia. Dengan demikian daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan manusia yang tercermin dari angka IPM yang meningkat.

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang yang besar untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Hasil otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini dapat tercermin melalui rasio kemandirian fiskal yang ditunjukkan oleh rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Rasio kemandirian fiskal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio tersebut bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2007). Rasio ini juga menjadi ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi (Halim, 2001).

Zou dan Davoodi (1998) menemukan hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, tetapi tidak di negara maju. Hal ini dapat dijelaskan di negara-negara berkembang tentang pengambilan

keputusan penerimaan pendapatan dan pengeluaran pendapatan oleh pemerintah daerah dibatasi oleh pemerintah pusat.

Sementara itu, teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan IPM dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin dan Bonar, 2004).

Terdapat hubungan penting antara IPM dan kapasitas pendapatan produktif. Pendapatan merupakan penentu utama dan hasil dari pembangunan manusia. Orang miskin menggunakan tenaga mereka untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi kemiskinan akibat kurangnya pendidikan, serta gizi dan kesehatan yang buruk mengurangi kapasitas mereka untuk bekerja. Dengan demikian, akibat rendahnya IPM adalah orang miskin tidak dapat mengambil keuntungan oportunitas pendapatan produktif karena terjadinya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penyediaan pelayanan sosial dasar merupakan unsur penting dalam penanganan kemiskinan (Kanbur dan Squire, 1999).

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pekerjaan yang disebut pengangguran. Todaro (2000) mengemukakan bahwa pembangunan manusia memiliki peran untuk membentuk keberhasilan suatu negara dalam upaya penyerapan teknologi-teknologi yang semakin modern sebagai tujuan untuk pengembangan kapasitas individu dalam peningkatan kualitas kerja serta mengurangi angka pengangguran untuk mencapai pembangunan manusia yang terus berkelanjutan. Jika pengangguran diatasi maka akan berdampak kepada peningkatan pendapatan suatu penduduk sehingga akan berdampak kepada peningkatan pembangunan manusia dengan berbagai peningkatan kualitas hidup yang berhasil dicapai seperti kebutuhan gizi, konsumsi rumah tangga dan pendidikan maka pengurangan

pengangguran dapat mengalami perubahan indeks pembangunan manusia yang semakin meningkat.

2.2. Tinjauan Kajian Empiris

Kajian internasional dan nasional mengenai IPM menunjukkan beberapa indikator dapat memengaruhinya. Sementara itu kajian mengenai faktor yang mempengaruhi IPM terangkum di tabel di bawah ini:

Penulis	Hal yang Diuji	Wilayah yang Diteliti	Hasil Penelitian
Shah (2016)	Menguji faktor-faktor yang mempengaruhi IPM diantaranya: PDB; angka harapan hidup; angka melek huruf; gini; tingkat kesuburan; emisi co2; dan tingkat inflasi	IPM dari 188 negara	Faktor penentu indeks pembangunan manusia (IPM) seperti PDB per kapita, angka melek huruf, harapan hidup saat lahir, indeks Gini, tingkat kesuburan dan emisi Co2 yang signifikan dalam analisis regresi empiris.
Eren et al. (2014)	Menguji faktor-faktor yang mempengaruhi IPM diantaranya: angka harapan hidup saat lahir; rata-rata lama sekolah; angka melek huruf; Rasio guru dan murid; persentase wanita di kursi parlemen; angka partisipasi buruh (rasio pria dan wanita) populasi; dan PDB per kapita.	IPM dari 84 negara	Faktor penentu termasuk harapan hidup saat lahir, tahun sekolah yang diharapkan, tingkat partisipasi angkatan kerja (rasio perempuan-laki-laki), dan PDB per kapita memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat pembangunan.
Hamzah et al (2012)	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pendapatan per kapita, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran, jumlah penduduk miskin, alokasi anggaran pemerintah daerah untuk pendidikan, alokasi anggaran pemerintah daerah untuk kesehatan, alokasi anggaran pemerintah daerah untuk lingkungan, anggaran pemerintah daerah alokasi untuk perumahan dan fasilitas publik, implementasi otonomi daerah, implementasi UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menuju	Provinsi di Indonesia periode 1993-2009.	Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi, dan pertumbuhan pengangguran berhubungan negatif dengan kualitas pembangunan manusia. Pendapatan per kapita, alokasi dana pendidikan pemerintah dan dummy otonomi daerah berpengaruh positif terhadap kualitas pembangunan manusia. Variabel distribusi pendapatan, jumlah penduduk miskin, alokasi dana kesehatan pemerintah daerah, alokasi dana lingkungan pemerintah daerah, alokasi dana perumahan dan fasilitas publik pemerintah daerah, serta implementasi UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia.

	kualitas pembangunan manusia di Indonesia.		
Çaglayan-Akay dan Van (2017)	Menentukan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat perkembangan ekonomi negara-negara tertentu seperti persentase populasi perempuan di pedesaan, persentase pengeluaran di bidang kesehatan terhadap PDB; PDB per kapita; jumlah pengguna internet; angka harapan hidup saat lahir; persentase wanita di kursi parlemen; harapan lama sekolah menggunakan model probit bayesian.	IPM 130 negara periode 2009-2014	Terdapat korelasi positif dalam jangka pendek antara variabel persentase pengeluaran di bidang kesehatan terhadap PDB, PDB per kapita, jumlah pengguna internet, angka harapan hidup saat lahir, bagian dari tahun sekolah yang diharapkan, kursi di parlemen dan IPM. Dalam jangka panjang, terdapat korelasi negatif antara variabel persentase populasi perempuan di pedesaan dan angka harapan hidup saat lahir dan indeks pembangunan manusia, dan korelasi positif antara variabel lain dan IPM. Hasil regresi menunjukkan bahwa, pengguna internet dan PDB per kapita secara statistik signifikan pada tingkat perkembangan dari 130 negara yang dianalisis.
Khodaba khshi (2011)	Mempertimbangkan hubungan antara PDB dan tiga indikator sumber daya manusia yaitu IPM, angka harapan hidup, dan angka melek huruf di India. Selain itu, juga mengevaluasi hubungan dan efek timbal balik dari masing-masing indikator pengembangan sumber daya manusia dalam perekonomian India	India	PDB per kapita dalam perekonomian India telah mengalami pertumbuhan yang baik. PDB memiliki pengaruh positif terhadap IPM, tetapi pengaruhnya pada indikator selain indeks pembangunan manusia sangat rendah bahkan pada beberapa indikator seperti angka harapan hidup tidak efektif.
Singariya (2014)	Mengeksplorasi beberapa faktor sosial ekonomi yang terkait dengan IPM di India.	India	Tingkat kematian bayi, angka kemiskinan dan pernikahan di bawah usia delapan belas tahun juga memainkan peran penting dalam mengurangi nilai IPM.
Ranis et al. (2000)	Hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (IPM)	Negara Amerika Latin	Terdapat korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan IPM. Terlihat pengaruh pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan, terutama bagi perempuan, sangat penting dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM.
Setiawan dan Hakim (2013)	Memodelkan perilaku IPM dengan variabel-variabel seperti PDB, Pajak Pendapatan (PPN), variabel	Indonesia	PDB dan PPN secara signifikan mempengaruhi IPM; PDB berpengaruh positif terhadap IPM, karena peningkatan PDB akan

	<p><i>dummy</i> desentralisasi pemerintahan, variabel <i>dummy</i> krisis tahun 1997, dan variabel <i>dummy</i> krisis tahun 2008.</p>		<p>memperbaiki kesejahteraan penduduk. Sementara itu, PPN berpengaruh negatif terhadap IPM karena peningkatan pajak pemerintah mengurangi <i>disposable income</i>, sehingga menurunkan kesejahteraan masyarakat. Variabel krisis ekonomi dan desentralisasi tidak berpengaruh secara positif terhadap IPM.</p>
Bhakti et. al. (2014)	<p>Faktor-faktor yang memengaruhi IPM yaitu PDRB, rasio ketergantungan, konsumsi rumah tangga untuk makanan, APBD untuk pendidikan, dan APBD untuk kesehatan.</p>	Provinsi di Indonesia periode 2008-2012	<p>Faktor yang memengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia adalah produk domestik regional bruto (PDRB) dan anggaran provinsi untuk kesehatan, rasio ketergantungan dan konsumsi rumah tangga untuk makanan. Sementara itu, anggaran provinsi untuk pendidikan tidak mempengaruhi IPM.</p>
Ginting (2008)	<p>Menganalisis pengaruh konsumsi rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, rasio penduduk miskin dan krisis ekonomi terhadap pembangunan manusia di Indonesia.</p>	Indonesia	<p>Terdapat pengaruh yang signifikan antara konsumsi rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, rasio penduduk miskin dan krisis ekonomi terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Variabel <i>dummy</i> krisis ekonomi menunjukkan pengaruh negatif.</p>
Sofilda et al (2015)	<p>Menguji faktor-faktor yang mempengaruhi IPM seperti pertumbuhan ekonomi (PDB dengan harga konstan), pengeluaran rata-rata per kapita, populasi, rasio ketergantungan, tingkat pengangguran, alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan</p>	33 provinsi di Indonesia periode 2004 to 2013	<p>Daerah-daerah yang memiliki IPM di bawah rata-rata IPM nasional menunjukkan bahwa variabel pengeluaran rata-rata per kapita, populasi, tingkat pengangguran, alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM dan daerah-daerah yang memiliki IPM di atas rata-rata IPM nasional menunjukkan bahwa PDB dengan harga konstan, pengeluaran rata-rata per kapita, rasio ketergantungan, tingkat pengangguran, dan anggaran pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM.</p>
Arisman (2018)	<p>Faktor-faktor yang mempengaruhi IPM seperti populasi negara, tingkat inflasi negara, tingkat pengangguran negara, pertumbuhan pendapatan per kapita</p>	Negara ASEAN periode 2000-2015	<p>Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya IPM pada negara anggota ASEAN. Sedangkan variabel tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia.</p>

Chalid dan Yusuf (2014)	Pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).	Kabupaten /Kota di Provinsi Riau	Hasil analisis diketahui tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap IPM. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM. Upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM. Variabel yang sangat besar pengaruhnya terhadap IPM adalah laju pertumbuhan ekonomi.
Anggraini dan Sutaryo (2015)	Pengaruh rasio keuangan (rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), rasio efisiensi pendapatan asli daerah (PAD) dan rasio efektivitas pajak daerah) terhadap IPM	Provinsi di Indonesia	Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan tiga variabel independen yang lain yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap IPM.
Sarkoro (2016)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap IPM	Provinsi di Indonesia	Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara simultan Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh IPM.
Amalia & Purbadharma (2014)	Menguji pengaruh kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja terhadap IPM	Kabupaten /kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012	Secara simultan kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja berpengaruh signifikan terhadap IPM, Secara parsial, kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.
Dewi & Sutrisna (2015)	Pengaruh kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia.	Kabupaten /kota di Provinsi Bali	Secara simultan kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap PM, secara parsial kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Pengumpulan Data dan Pengukuran Variabel

Studi ini menggunakan sampel seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. Variabel dependen yang digunakan dalam studi ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama 2013 hingga 2017 yang diterbitkan oleh BPS. Variabel dependennya antara lain produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, rasio gini, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, rasio kemandirian fiskal, dan rasio pendapatan daerah terhadap total belanja daerah tiap provinsi selama periode 2013-2017. Data untuk melengkapi variabel tersebut diambil dari berbagai sumber, seperti BPS dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

3.2. Metode Analisis Data

Seperti disampaikan sebelumnya bahwa studi ini menggunakan data panel pada 34 provinsi di Indonesia pada periode 2013 - 2017. Untuk menguji faktor penentu yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di semua provinsi di Indonesia maka teknik regresi panel akan digunakan. Teknik regresi panel digunakan jika data merupakan kombinasi data *time series* dengan data *cross-section*. Beberapa teknik dapat digunakan untuk mengukur parameter model, seperti, *ordinary least square*; kedua, *fixed effect model*; dan ketiga, *random effect model*. Pada penelitian ini menggunakan regresi panel dengan *fixed effect model*, karena dianggap bahwa intersep tidak konstan. Ada beberapa langkah dalam penelitian ini, seperti: pertama, mengestimasi menggunakan *fixed effect model*. Kedua, melakukan uji Chow untuk memilih antara model *ordinary least square* atau *fixed effect*. Ketiga, akan dilakukan tes Hausman untuk memilih antara *fixed effect model* dan *random effect model*. Persamaan matematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$IPM = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon_{it}$$

Dimana, IPM adalah Indeks Pembangunan Manusia; α adalah konstanta; β adalah koefisien; X_1 adalah produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita; X_2 adalah tingkat pengangguran terbuka; X_3 adalah tingkat kemiskinan; X_4 adalah rasio kemandirian fiskal; dan ε adalah error.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Penentuan Model Pengujian Data Panel

Dari hasil pengumpulan data di 34 provinsi, hanya 33 provinsi yang memiliki data yang lengkap selama periode pengujian. Provinsi Kalimantan Utara yang tergolong sebagai provinsi baru tidak memiliki data yang lengkap dari periode 2013 hingga 2017. Sehingga demi pengujian dalam persamaan akan digunakan data panel dari 33 provinsi tersebut.

Persamaan yang akan diuji dapat dinyatakan ke dalam bentuk model logaritma natural linier melalui transformasi terhadap variabelnya. Transformasi dilakukan dengan melakukan mencari bentuk logaritma natural dari tiap variabel persamaan sehingga model itu berubah menjadi bentuk linier, seperti di bawah ini:

$$\ln(IPM) = \alpha + \beta_1 \ln(X_1) + \beta_2 \ln(X_2) + \beta_3 \ln(X_3) + \beta_4 \ln(X_4) + \varepsilon_{it}$$

Dimana, IPM adalah Indeks Pembangunan Manusia; α adalah konstanta; β adalah koefisien; X_1 adalah produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita; X_2 adalah tingkat pengangguran terbuka; X_3 adalah tingkat kemiskinan; X_4 adalah rasio kemandirian fiskal; dan ε adalah error.

Seperti disampaikan sebelumnya bahwa untuk menentukan model mana yang tepat, dilakukan beberapa pengujian yang hasilnya akan menunjukkan model yang paling sesuai dalam pengujian persamaan. Pengujian ini dilakukan melalui beberapa langkah. Persamaan yang diuji tentunya melalui ketiga proses pengujian dengan tiga jenis model tersebut. Kemudian Chow test dilakukan untuk menentukan mana yang lebih sesuai, *common effect* atau *fixed effect*. Hasil pengujian ini tampak di Tabel 2. Hasil dari Chow test tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section* Chi-square menunjukkan angka 0,0000 atau kurang dari 0,05, yang berarti bahwa model *fixed effect* lebih baik daripada *common effect*.

Tabel 2. Hasil Pengujian Chow Test (parsial)

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: EQ03_EQ04_OK
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	550.20333 9	(32,128)	0.0000
Cross-section Chi-square	813.65415 4	32	0.0000

Sumber: Data diolah, 2019

Langkah selanjutnya kita memperkirakan persamaan dengan *random effect model*. Setelah itu menggunakan Hausman-test, kita dapat melihat bahwa kita menolak hipotesis nol yang menyatakan *random effect model* konsisten, sehingga model terbaik yang dipilih pada penelitian ini adalah *fixed effect model*. Kita dapat melihat hasil tes Hausman pada Tabel 3. Tampak dari hasil Hausman Test bahwa nilai *cross-section random* memiliki nilai probabilitas 0,0000 atau kurang dari 0,05. Dari hasil tersebut maka diputuskan bahwa untuk pengujian dengan model di atas akan digunakan *fixed effect model*.

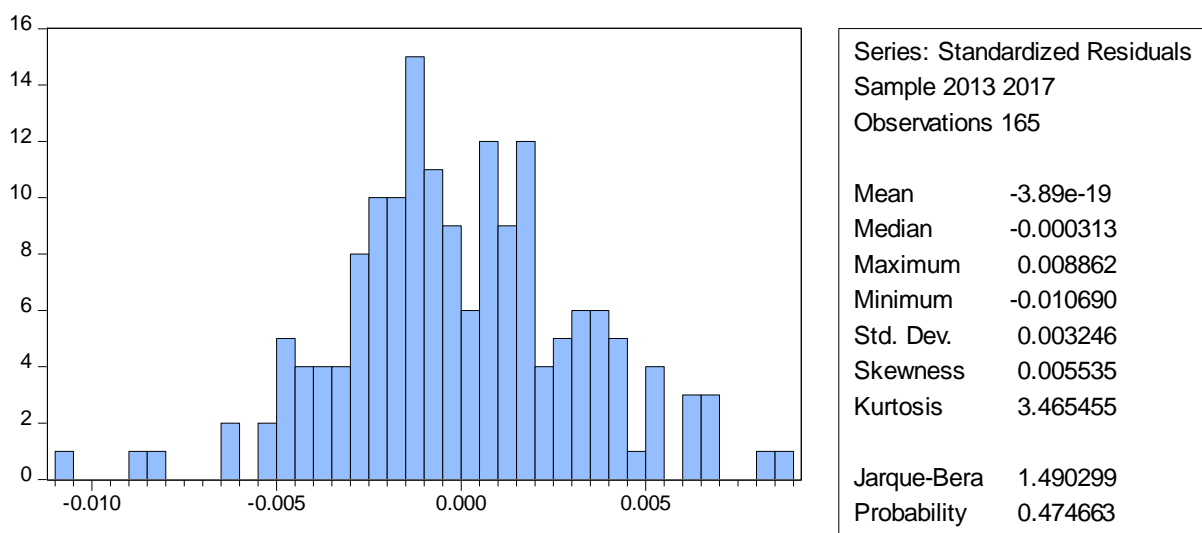
Tabel 3. Hasil Pengujian Hausman Test (parsial)
Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: EQ03_EQ04_OK
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	27.422397	4	0.0000

Sumber: Data, diolah

4.2. Hasil Pengujian Empiris

Setelah ditentukan bahwa *fixed effect model* merupakan model yang paling sesuai untuk menggambarkan persamaan data panel yang diuji, maka dilakukan uji asumsi klasik terhadap persamaan tersebut. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa regresi dengan model *fixed effects* tersebut memiliki residual yang berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas uji Jarque Bera dari Gambar 3 sebesar 0,47 atau melebihi nilai signifikansi 5 persen.

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Hasil olah data dengan E-Views

Kondisi tidak adanya masalah multikolinieritas pada variabel independen juga terbukti dengan nilai korelasi antar variabel independen. Selain itu, masalah dengan heteroskedastisitas juga tidak terjadi dalam persamaan ini. Hal ini diuji dengan melakukan regresi antara nilai absolut residual persamaan dengan variabel independen. Jika hasil pengujian ini menunjukkan nilai probabilitas yang lebih tinggi dari 0,05 maka heteroskedastisitas tidak terjadi. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat dalam Tabel 4. Dengan terpenuhinya asumsi klasik tersebut, maka estimator yang dihasilkan bersifat BLUE, sehingga hasil estimasi dapat digunakan untuk analisis data.

Tabel 4. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Variabel	Probabilitas
PDRB per Kapita	0,6633
Tingkat Pengangguran Terbuka	0,9104
Tingkat Kemiskinan	0,4820
Rasio Kemandirian Fiskal	0,9876

Sumber: Hasil olah data dengan E-Views

Hasil penghitungan nilai statistik uji F dan nilai F kritis dapat dilihat di Tabel 5. Dari Tabel 5 juga diketahui bahwa estimasi model menghasilkan nilai R^2 sebesar 0,997279 (99,72 persen). Artinya, keberadaan variabel-variabel independen mampu menjelaskan variabel independen sebesar 99,72 persen, selebihnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Suatu derajat penjelasan yang

sangat tinggi yang menunjukkan bahwa regresi model *fixed effect* memiliki estimasi yang paling dekat dengan data yang ada.

Tabel 5. Hasil Pengujian Persamaan dengan Fixed Effect Model

Variabel	Koefisien
Konstanta	3.985413**
PDRB per Kapita	0.079662**
Tingkat Pengangguran Terbuka	-0.001290
Tingkat Kemiskinan	-0.024099**
Rasio Kemandirian Fiskal	7.04E-05
R-squared	0.997279
Adjusted R-squared	0.996514
F-statistic	1303.265

Sumber: Hasil olah data dengan E-Views

**signifikan pada level signifikansi 5 persen

Secara parsial, variabel yang memberikan pengaruh signifikan terhadap variasi IPM antara lain PDRB per kapita dan tingkat kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dari nilai probabilitas masing-masing variabel yang berada di bawah 0,05 (0,0000 dan 0,0011, secara berurutan). PDRB per kapita berpengaruh positif secara signifikan terhadap variasi IPM. Artinya makin tinggi nilai pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka makin besar nilai IPM daerah yang bersangkutan. Hal ini bermakna bahwa daerah yang terus memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerahnya dapat memicu pembangunan dan nantinya dapat berdampak pada IPM (Arisman, 2018).

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian dengan objek negara-negara Amerika Latin oleh Ranis et al. (2000) juga menyatakan hal yang sama, bahwa pertumbuhan PDB per kapita terbukti signifikan dan cukup kuat, dengan pertumbuhan pendapatan per kapita yang lebih tinggi mengarah pada kinerja pembangunan manusia yang lebih baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Khodabakhshi (2011), Bhakti, et al. (2014), Eren, et al. (2014), Hamzah, et al. (2012), Shah (2016), Çaglayan-Akay dan Van (2017), dan Setiawan dan Hakim (2013). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan landasan teori yang dikemukakan oleh Kuznet bahwa salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya pertumbuhan output per kapita (Todaro, 2006). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi mengubah pola konsumsi karena peningkatan daya beli. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan IPM

karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yang disebut indikator pendapatan.

Sementara itu, tingkat kemiskinan mempengaruhi IPM secara signifikan dengan arah negatif. Makin tinggi tingkat kemiskinan suatu daerah maka nilai IPM daerah tersebut akan semakin menurun. Pengaruh signifikan tingkat kemiskinan terhadap IPM sesuai dengan teori kemiskinan absolut dimana sejumlah penduduk tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, penduduk hidup di bawah pendapatan riil minimum atau dapat dikatakan hidup di bawah kemiskinan internasional (Todaro dan Smith, 2006). Jika garis kemiskinan semakin meningkat dan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka maka akan tercipta siklus dimana terlihat dari rendahnya pendapatan nyata sehingga akan mengakibatkan permintaan menjadi rendah sehingga investasi juga rendah dan dapat mengurangi produktivitas.

Selain itu, siklus tersebut juga menyangkut keterbelakangan manusia dan sumber daya alam, dimana perkembangan sumber daya alam itu tergantung pada kemampuan produktivitas manusianya. Jika tingkat kemiskinannya tinggi maka manusia tidak akan mampu untuk memperoleh pendidikan sehingga terciptalah penduduk yang terbelakang sehingga kemampuan untuk mengolah sumber daya alam yang produktif tidak terpenuhi bahkan terbengkalai atau salah guna (Todaro dan Smith, 2006). Hasil tersebut juga sesuai dengan teori pertumbuhan baru yang menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan IPM dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chalid dan Yusuf (2014); Singariya (2014); dan Ginting (2008) dimana diperoleh hasil penelitian tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM, namun tidak sejalan dengan Hamzah et al. (2012).

Sementara itu, pengaruh yang tidak signifikan antara rasio kemandirian fiskal dan IPM menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah atau kemampuan daerah menghasilkan pendapatannya sendiri belum mampu mengangkat pembangunan manusia di wilayah yang bersangkutan. Hal tersebut berlawanan dengan Cardiman (2006), yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan daerah berarti juga meningkatkan anggaran belanja daerah. Peningkatan belanja daerah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan belanja daerah akan meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi di daerah yang selanjutnya akan menciptakan berbagai lapangan kerja bagi

masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Beberapa penelitian membuktikan hal yang berbeda dengan hasil pengujian ini antara lain Sarkoro (2016); Amalia & Purbadharmaja (2014); dan Dewi & Sutrisna (2015) yang menyebutkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah atau kemandirian fiskal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Sementara itu, hasil pengujian ini sejalan dengan hasil penelitian Anggraini dan Sutaryo (2015). Merujuk pada penelitian sebelumnya, maka peningkatan kemandirian daerah masih dirasa perlu demi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan semangat desentralisasi untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui kemandirian fiskal, pemerintah provinsi harus lebih fokus dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber keuangan sendiri untuk membiayai belanja daerah. Hasil yang tidak signifikan dari penelitian ini, menurut pendapat penulis merupakan cerminan belum optimalnya pemerintah provinsi menggali potensi pendapatan daerahnya sehingga proses pembangunan manusia belum dapat menggambarkan hasil optimal pemanfaatan potensi daerah.

Variabel terakhir yang diuji yaitu tingkat pengangguran tidak berpengaruh pada indeks pembangunan manusia di 33 provinsi di Indonesia. Hubungan yang tidak signifikan antara tingkat pengangguran dan IPM tersebut sejalan dengan Arisman (20018) namun berlawanan dengan Hamzah et al. (2012); Chalid & Yusuf (2014); Solfida (2015); dan Todaro (2000). Todaro (2000) yang mengemukakan bahwa jika pengangguran diatasi maka akan berdampak kepada peningkatan pendapatan suatu penduduk sehingga akan berdampak berbagai peningkatan kualitas hidup seperti kebutuhan gizi, konsumsi rumah tangga dan pendidikan maka pengurangan pengangguran dapat mengubah indeks pembangunan manusia menjadi semakin meningkat. Hasil ini menyiratkan bahwa penanganan pengangguran di Indonesia belum dapat memberikan perubahan kualitas hidup bagi masyarakat, sehingga kondisi berkurangnya pengangguran tidak berdampak pada meningkatnya indeks pembangunan manusia.

Menurut penulis, hal ini dapat terjadi jika penciptaan lapangan kerja tidak memberikan manfaat yang berarti bagi pengangguran itu sendiri. Hal ini diduga karena kurangnya lapangan kerja di sektor-sektor yang memberikan pendapatan tinggi seperti sektor industri, sementara penyerapan yang lebih tinggi di sektor pertanian hanya mampu memberikan pendapatan bagi masyarakat

berpenghasilan dan berpendidikan rendah. Untuk itu pemerintah perlu merevitalisasi sektor pertanian dari hulu ke hilir untuk membantu dari sektor primer (pertanian). Jika program ini dapat dijalankan secara efektif, secara tidak langsung dapat mendorong ekonomi pedesaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. terbukti dari banyaknya pengangguran dengan tingkat pendidikan tinggi yang tidak dapat diserap oleh lapangan pekerjaan yang ada. Kebijakan pemerintah dalam kemudahan berusaha dan berinvestasi juga masih lemah dalam meningkatkan minat investor untuk membuka usaha sehingga menurunkan minat berwirausaha dan stagnan dalam penciptaan lapangan kerja. Dengan kondisi tersebut, pemerintah perlu memikirkan kebijakan yang dapat mengatasi pengangguran secara komprehensif, menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan karakter pengangguran yang ada dan memberi kemudahan bagi investor untuk membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang memengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia. Beberapa variabel yang digunakan diantaranya pertumbuhan ekonomi regional yang diukur dengan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan rasio kemandirian fiskal tiap provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB per kapita dan tingkat kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Arah pengaruh PDRB per kapita terhadap IPM adalah positif artinya jika PDRB per kapita bertambah maka IPM meningkat. Namun, hubungan sebaliknya terjadi antara tingkat kemiskinan dan IPM, makin tinggi tingkat kemiskinan, makin rendah nilai IPM. Hal ini menyiratkan bahwa upaya pemerintah provinsi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya berdampak pada pembangunan manusia di daerah tersebut. Sementara itu, pengentasan kemiskinan dapat diartikan makin meluasnya pembangunan yang nantinya berdampak pada peningkatan IPM.

Variabel lain yang diuji, antara lain tingkat pengangguran terbuka dan rasio kemandirian fiskal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Artinya, tinggi atau rendahnya lapangan kerja yang tersedia di suatu daerah belum mampu menciptakan dampak pada pembangunan manusia. Hal ini dapat terjadi jika penciptaan lapangan kerja tidak memberikan manfaat yang berarti bagi pengangguran itu sendiri, terbukti dari banyaknya pengangguran dengan tingkat

pendidikan tinggi yang tidak dapat diserap oleh lapangan pekerjaan yang ada. Sementara itu, rasio kemandirian fiskal daerah yang mencerminkan kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatannya sendiri juga tidak berdampak pada pembangunan manusia. Hal ini merupakan cerminan belum optimalnya pemerintah provinsi menggali potensi pendapatan daerahnya sehingga proses pembangunan manusia belum dapat menggambarkan hasil optimal pemanfaatan potensi daerah.

5.2. Rekomendasi.

Untuk penelitian berikutnya, perlu dipertimbangkan variabel lain yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan manusia. Dari penelitian ini diketahui bahwa melihat pemanfaatan anggaran daerah dari segi pendapatan belum memberikan pengaruh bagi pembangunan manusia, maka ke depannya diperlukan penelitian yang menguji pengaruh belanja daerah bagi IPM. Selain itu, penambahan sampel daerah juga diperlukan, seperti pemerintah kabupaten/kota, mengingat wewenang pemerintah kabupaten/kota mencakup lebih banyak dibandingkan wewenang pemerintah provinsi. Hal ini juga diperlukan untuk melihat peran desentralisasi bagi pembangunan di daerah tersebut.

Merujuk pada hasil penelitian ini, bagi pemerintah daerah, perlu diupayakan optimalisasi pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerahnya agar dampak pembangunan makin dirasakan oleh masyarakat yang nantinya berakhir pada peningkatan nilai IPM.

Daftar Pustaka

- Amalia, FR & IBP. Purbadharmaja. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Jurnal. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana.
- Anggarini, T. dan Sutaryo. (2015). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi 18, Medan, 16-19 September 2015.
- Arisman. (2018). *Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries*. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi. Vol. 7 (1): 113 – 122.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Indeks Pembangunan Manusia 2016. Jakarta: CV. Rioma.
- _____. (2019). Indeks Pembangunan Manusia 2018. Berita Resmi Statistik No. 32/04/Th. XXII, 15 April 2019.

- Barzelay, M. (1991). *Managing Local Development, Lesson from Spain*. Policy Sciences, 24, 271 – 290.
- Bhakti, N.A., Istiqomah, & Suprpto. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012 (*The Factors that Affect the Human Development Index in Indonesia*). Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol. 18 (4): 452-469
- Brata, A. G. (2004). Analisis Hubungan Imbal Balik Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tingkat II di Indonesia. Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Çaglayan-Akay, E., & Van, M.H. (2017). *Determinant of the Levels of Development Based on the Human Development Index: Bayesian Ordered Probit Model*. International Journal of Economics and Financial Issues. Vol. 7 (5): 425-431.
- Cardiman. (2006). Strategi Alokasi Belanja Publik untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Riau: Pekanbaru.
- Dewi, PAK., Sutrisna, IK. (2015). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 4, No. 1, Januari 2015.
- Eren, M., Çelik, A.K., & Kubat, A. (2014). *Determinant of the Level of Development Based on the Human Development Index: A Comparison of Regression Models for Limited Dependent Variables*. Review of European Studies. Vol. 6 (1): 10-23.
- Ginting, C.K. (2008). Analisis Pembangunan Manusia di Indonesia. Tesis, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Halim, Abdul. (2001). Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat.
- Hamzah, M, Risqiani, R., & Sofilda, E. (2012). *Human Development Quality and Its Problems in Indonesia*. OIDA International Journal of Sustainable Development. Vol. 5, No. 7, 29-36.
- Hasan, Z. (2013). *Determinants of Human Resource Development: An Empirical Analysis*. International Journal of Economics, Management, and Accounting. Vol. 8 (2).
- Kanbur, R dan Squire, L. (1999). *The Evolution of Thinking about Poverty: Exploring The Interactions*. <http://kanbur.dyson.cornell.edu/papers.htm>. Diambil kembali tanggal 12 Juni 2016.

- Khodabakhshi, A. (2011). *Relationship between GDP and Human Development Indices in India*. Journal Department of Economics. Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran 1 (1):1-9.
- Muhammad, D., Majeed, S., Hussain, A. (2010). *Impact of Globalization on HDI (Human Development Index): Case Study of Pakistan*, European Journal of Social Sciences, Vol. 13, No. 1. New York.
- Ranis, G., Stewart, F., Ramirez, A. (2000). *Economic Growth and Human Development*, World Development, Vol. 28, No. 2.
- Sarkoro, H. (2016). Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2012-2014). Skripsi.
- Setiawan, M.B., & Hakim, A. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (*The Indonesian Human Development Index*). Jurnal Economia, Vo. 9 (1): 18-26.
- Shah, S. (2016). *Determinant of Human Development Index: A Cross-Country Empirical Analysis*. Munich Personal RePEc Archive (MRPA) Paper No. 73759.
- Singariya, M.R. (2014). *Socioeconomic Determinant of Human Development Index in India*. Management and Administrative Sciences Review. Vol. 3 (1): 69-84.
- Sofilda, E, P. Hermiyanti, dan MZ. Hamzah. (2015). *Determinant Variable Analysis of Human Development Index in Indonesia (Case For High And Low Index At Period 2004 – 2013)*. OIDA International Journal of Sustainable Development. Ontario International Development Agency. Canada ISSN.
- Todaro., M. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga. Jakarta.
- Todaro., M. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Todaro., M, P., & Smith, S, SC. (2006). *Pembangunan Ekonomi Edisi 9 Jilid 1*. Erlangga. Jakarta.
- United Nations Development Programme. (1990). *Human Development Report*. UNDP. New York
- _____. (2007). *Human Development Report*. UNDP. New York.
- _____. (2011). *Human Development Report*. UNDP. New York.
- _____. (2018). *Human Development Report*. UNDP. New York.
- _____. (2007). *Measuring Human Development: A Primer*. UNDP. New York.
- Zou, H., Davoodi, H. (1998). *Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study*. Journal of Urban Economics.